

TESIS

**Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru.**



ALFINES TUNGGAL

No. Mhs : 145202174/PS/MIH

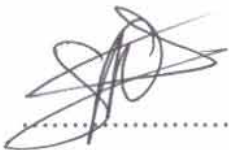
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : ALFINES TUNGGAL
Nomor Mahasiswa : 145202174/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru .

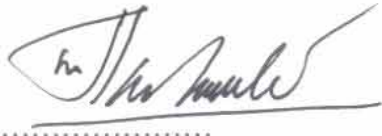
Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	17 Desember 2015	
Prof. Dr. Paulinus Soge, Drs.SH., M.Hum.	17 Desember 2015	



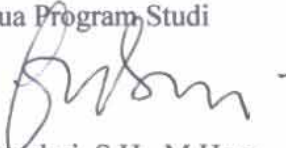
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ALFINES TUNGGAL
Nomor Mahasiswa : 145202174/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru.

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. (Ketua)	14 Januari 2016	
Prof. Dr. Paulinus Soge, Drs., SH., M.Hum (Anggota)	14 Januari 2016	
Dr. G. Sri Nurhartanto., SH., LL.M (Anggota)	14 Januari 2016	

Ketua Program Studi


Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfines Tunggal

No. Mhs : 145202174

Alamat : Jl. Pisang, Nomor 111 Saren, Kelurahan Catur
Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini, dengan judul Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (magister hukum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Desember 2015

Yang menyatakan

Alfines Tunggal

ABSTRAKSI

Penelitian yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. ini difokuskan pada permasalahan antara lain: mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala pengawasan terhadap implementasi Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Penulis tertarik pada judul tersebut karena ingin mengetahui kinerja para wakil rakyat (DPRD) yang bertindak untuk dan atas nama rakyat,

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan mengupayakan solusi guna menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta mengkajinya dari perspektif teori Otonomi Daerah, teori Retribusi, teori pengawasan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di kabupaten Kepulauan Aru belum dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yaitu berkaitan dengan pelaksanaan oleh badan pemerintahan yang khusus menanggulangi retribusi dan persampahan dalam hal ini BPLH, selain itu kurang adanya dukungan anggaran yang cukup. Faktor lainnya yang berkaitan dengan standar manajemen pengawasan yang menjadi pedoman fungsi pengawasan secara eksplisit tidak diatur dengan jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru tidak dilakukan dengan rencana dan strategi program yang baik. (3) Upaya yang dilakukan anggota DPRD terhadap faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melihat pada kurangnya ketersediaannya anggaran yang dilimpahkan untuk pembiayaan infrastruktur pendukung kebersihan. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru mengambil kebijakan dengan mengutamakan masukan dari masyarakat secara tertulis, maupun lisan, sehingga pengawasan atas pelaksanaan Perda tersebut bisa tetap dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Kata Kunci : Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Implementasi, Peraturan Daerah dan Retribusi.

Abstract

This research entitled the Supervision of the People's Representative Council towards the implementation of Regional Regulation No. 8 of 2014 to Retribution of Rubbish/Sanitation Services at Regency Kepulauan Aru. The research focused on the problem, among others: supervision mechanism of People's Representative Council, the obstacles faced and the solution to overcome supervision problem toward the implementation of Regional Regulation of Rubbish/Sanitation Services Retribution. The writer was interested to the title because he wanted to find out the performance of people's representative (DPRD) in acting for and upon the people, as well as they were facilitated extravagantly from the people's money in conducting the supervising function toward

The research aimed to study and analyze the supervision mechanism of the People's Representative Council to the implementation of the Regional Regulation No. 8 year 2014 to the Retribution of Rubbish/Sanitation Services, to find out the obstacles faced by the People's Representative Council of Kepulauan Aru in conducting the supervision towards the implementation of Regional Regulation of Rubbish/Sanitation Services Retribution, and seeking solution to overcome the obstacles. The research was a normative research that used Law approach, along with studied it from the theory perspective of Regional Autonomy, theory of retribution and theory of supervision.

Result of the research concluded that: (1) the supervision mechanism conducted by DPRD toward the he implementation of the Regional Regulation No. 8 year 2014 to the Retribution of Rubbish/Sanitation Services at Kepulauan Aru had not been implemented well in the supervision function. (2) The obstacle factor in supervision implementation by the members of DPRD regency Kepulauan Aru was namely related with the implementation by the government that especially overcame the retribution and rubbish, in this case was BPLH. Besides, that was the lack of sufficient budget supports. The other factors related with supervision management standard that became the guideline of the supervision function are explicitly not regulated in Act Law in force so that the supervision by the members of DPRD Kepulauan Aru were not conducted in accordance with the good planning and strategy of the program. (3) The effort conducted by the member of DPRD toward the obstacles factor of supervision function of the could be seen from the lack of budget availability to infrastructure financing of sanitation aids. To overcome the matter, DPRD of Kepulauan Aru take a policy by considering people's recommendation in written and spoken, so that the supervision of the Perda's implementation could still be implemented in accordance with the mandate of Law.

Keywords: supervision, People's Representative Council, Implementation, Regional Regulation and Retribution.

KATA PENGANTAR

“ asal ada usaha pasti ada jalan ”

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang telah melimpahkan rahmat dan kasihnya kepada Penulis, sehingga penelitian yang berjudul: **Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru**, dapat diselesaikan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini tidak semata-mata merupakan usaha penulis secara personal, tetapi terlebih atas bantuan beberapa pihak yang dengan caranya yang khas dan tulus turut membantu Penulis. Penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada:

1. Allah Tritunggal Yang Mahakudus yang senantiasa memberikan rahmat dan pancaran pencerahan kasih-Nya sehingga dapat menjiwai Penulis selama proses penelitian.
2. Bapak Dr. W .Riawan Tjandra,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing utama yang dengan segala keikhlasannya, telah banyak meluangkan waktu dan pikiran memberikan bimbingan dan pencerahan kepada Penulis selama proses penelitian.
3. Bapak, Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge SH. M.Hum selaku dosen pembimbing II (dua), yang telah banyak meluangkan waktu untuk

memberikan sumbangan pemikiran, bimbingan dan masukan yang sangat berharga dalam merampungkan penulisan tesis ini.

4. Kedua orang tua penulis yakni Paulus Tunggal dan Since Djabumir yang selama ini telah memberikan suport baik secara spiritual maupun finansial
5. Para Narasumber: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
6. Pengelola Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang telah membantu Penulis mendapatkan jasa pustaka sehingga memperkaya sumber kepustakaan dalam penelitian ini.
7. Seluruh Dosen pada Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membentuk wawasan keilmuan di bidang hukum bagi Penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh teman teman penulis yang selama ini telah memberikan sngat serta doa bagi penulis

Akhirnya, Penulis haturkan limpah terima kasih kepada segenap pembaca yang terkasih. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belumlah sempurna dan masih membutuhkan ide-ide cermat dan kritis untuk melengkapi

dan membenahinya. Karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan kritis dan ide-ide cemerlang dari pembaca sekalian, guna memperdalam dan memperkaya isi tulisan ini. Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan.

Salam dan selamat membaca. *God Bless All...*



Penulis

Alfines Tunggal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan dan Konsep	11
D. Keaslian Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	19
1. Manfaat Teoretis	19
2. Manfaat Praktis	19
F. Tujuan Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengawasan	22
B. Tinjauan tentang DPRD	24
1. Kedudukan dan Fungsi DPRD	24
2. Tugas dan Wewenang DPRD	25
3. Hak dan Kewajiban DPRD	28
C. Tinjauan tentang Implementasi Peraturan Daerah dan Retribusi	31
1. Implementasi	31
2. Peraturan Daerah	33
3. Pembentukan Peraturan Daerah	35
4. Retribusi	37
D. Landasan Teori	40
1. Teori Otonomi Daerah	40
2. Teori Pengawasan	43
3. Teori Retribusi	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Sumber Data	51
D. Metode Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	54
F. Penarikan Kesimpulan	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru	59
B. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan	66
1. Pengawasan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014	66
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru	77
3. Susunan dan Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru	80
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru	97
5. Struktur Kepala Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)	100
C. Pengawasan DPRD kabupaten Kepulauan Aru terhadap Implementasi Perda nomor 8 tahun 2014 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan	105
D. Faktor Yang Menjadi Kendala Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru	113
E. Upaya Untuk Mengatasi Kendala DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru	118

BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	128

